PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Let. Jend. Sukowati Nomor 51 Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faksimile. (0298) 321398 Situs http://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/3180

TENTANG
TENAGA NON ASN YANG DIUSULKAN MENJADI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN
PERSYARATAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13470/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu , disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PENGUSULAN PPPK PARUH WAKTU PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Pemerintah Kota Salatiga telah mengusulkan secara selektif sesuai kemampuan keuangan daerah Tenaga Non ASN yang namanya masuk dalam data potensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

B. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI TENAGA NON ASN YANG DIUSULKAN MENJADI PPPK PARUH WAKTU

Tenaga Non ASN sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (NI PPPK Paruh Waktu) yang dipersyaratkan mulai tanggal 11 September 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermeterai Rp10.000,00 serta menyampaikan kelengkapan *scan* dokumen **ASLI** secara elektronik pada portal https://sscasn.bkn.go.id dengan login ke akun masing-masing.
2. Berkas persyaratan usul NI PPPK Paruh Waktu **WAJIB** dipindai/*scan* berwarna melalui mesin *scan* berwarna (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Ketentuan dokumen yang diunggah akan dijelaskan pada huruf C.
4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan pengumuman ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NI PPPK PARUH WAKTU

Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan yang akan **dilakukan secara *paperless*** dan mempersiapkan dokumen persyaratan yang akan diunggah pada portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai berikut:

1. **Pas foto terbaru** pakaian formal, warna putih polos, khusus yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam dengan latar belakang merah. Jenis File adalah JPG, ukuran file maksimal 500 KB.
2. **Scan berwarna (bukan foto)** Asli Ijazah pendidikan sesuai formasi jabatan yang diusulkan. Apabila pendidikan transfer maka Ijazah Asli DI/DII/DIII pendidikan sebelumnya dijadikan satu file. Jenis file adalah PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB). Berikut kualifikasi pendidikan sesuai jenis Jabatan:
   a. Guru : S1
   b. Penata Layanan Operasional : S1
   c. Pengelola Layanan Operasional : DIII
   d. Operator Layanan Operasional : SMA
   e. Pengelola Umum Operasional : SD/SMP
3. **Scan berwarna (bukan foto) Asli** Sertifikat Pendidik (bagi yang memiliki). File Sertifikat Pendidik digabung dengan File Ijazah.
4. **Scan berwarna (bukan foto) Asli** Transkrip Nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar. Apabila pendidikan transfer maka Transkrip Nilai Asli DI/DII/DIII pendidikan sebelumnya dijadikan satu file. Jenis file adalah PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB).
5. **Scan berwarna (bukan foto)** Daftar Riwayat Hidup (DRH) ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 yang formulir isiannya sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN ,dicetak menggunakan kertas HVS dengan tinta berwarna hitam. **Pada bagian berbintang** di dokumen DRH yaitu **Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir** wajib diisi/ditulis tangan dengan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam oleh masing-masing peserta. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB).
6. **Scan berwarna (bukan foto)** Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia **untuk keperluan "Usul Penetapan NI PPPK PARUH WAKTU"** dan **tertanggal mulai 11 September 2025**. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB).
7. **Scan berwarna (bukan foto)** Asli Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (bisa Rumah Sakit Umum Daerah/ Puskesmas/ Puskesmas Pembantu) untuk keperluan **Usul Penetapan "NI PPPK PARUH WAKTU"** dan **tertanggal mulai 11 September 2025** dengan ketentuan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas, serta nama dokter jelas terbaca serta pada bagian “memenuhi/tidak memenuhi syarat kesehatan” sudah dicoret salah satu oleh dokter pemeriksa;
b. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB).

8. **Scan berwarna (bukan foto) Asli** Surat - surat pernyataan yang formatnya tercantum dalam lampiran I, II,III **digabung menjadi 1 file PDF**, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) yang terdiri dari :
   a. Surat Pernyataan 5 (lima) komitmen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp10.000,00 serta **tertanggal mulai 11 September 2025**;
   b. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp10.000,00 serta **tertanggal mulai 11 September 2025**;
   c. Surat Pernyataan tidak menuntut pemerintah apabila tidak bisa diberikan NI PPPK yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp10.000,00 serta **tertanggal mulai 11 September 2025**;
9. **Nomor seri meterai** pada setiap dokumen harus memiliki **nomor yang berbeda** sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan bahwa bea meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen.

D. PENELITIAN BERKAS ASLI OLEH BKPSDM KOTA SALATIGA

Bagi Tenaga Non ASN yang namanya tertera pada daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan penelitian berkas asli dalam rangka pemberkasan pengajuan Nota Usul Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu yang akan dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang akan diumumkan lebih lanjut.

E. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagi Tenaga Non ASN yang tidak bersedia menjadi PPPK Paruh Waktu dapat mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul *dropdown list* YA dan TIDAK, klik YA untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih : TIDAK, jika ingin mengundurkan diri.
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri paling lambat tanggal 17 September 2025.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi Tenaga Non ASN sebagaimana tercantum dalam daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, yang tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Salatiga Formasi dilakukan melalui Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

3. Segala bentuk konsultasi dan komunikasi Tenaga Non ASN dengan BKPSDM terkait pemberkasan PPPK Paruh Waktu harus melewati Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.
4. Seluruh tahapan pemberkasan dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tidak dipungut biaya.
5. Jika ada pihak yang menjanjikan pengangkatan PPPK / PPPK Paruh Waktu dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kota Salatiga atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
6. Apabila di kemudian hari Tenaga Non ASN yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, maka Pemerintah Kota Salatiga dapat membatalkan/menggugurkan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196509251996032004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/3180
TANGGAL : 10 September 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Salatiga, ……
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp10.000,-

Ttd

Nama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/3180
TANGGAL : 10 September 2025

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama lengkap dengan gelar)

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Pendidikan :

Formasi Jabatan :

Lokasi Formasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

Tidak akan mengajukan pindah tugas terhitung sejak melaksanakan tugas/perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari manapun dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Salatiga, ……
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

Ttd

Nama lengkap dengan gelar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/3180
TANGGAL : 10 September 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Forasi yang dilamar :

Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya walaupun telah diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu namun tidak bisa diberikan NI PPPK, karena :

1. Ijazah palsu
2. Surat Keterangan Palsu
3. Tidak bisa melengkapi administrasi
4. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan

Saya tidak akan menuntut kepada Pemerintah Kota Salatiga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan sebenar - benarnya

Salatiga, ……
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

Ttd

Nama lengkap dengan gelar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 800.1.2.2/3180
TANGGAL : 10 September 2025

SURAT KETERANGAN
KESALAHAN/PERBEDAAN DATA/DATA TIDAK SESUAI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama lengkap dengan gelar

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat dan No. HP :

Pendidikan :

Formasi :

Lokasi Formasi :

Dengan ini menerangkan, bahwa terjadi kesalahan data pada dokumen sebagai berikut:

NO.	DOKUMEN	TERTULIS (YANG SALAH)	SEHARUSNYA (YANG BETUL)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ttd

Nama lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).